



Literasi Digital Sebagai Pilar Demokrasi Digital: Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Di Era Disrupsi Teknologi

Cecep Nana Nasuha¹⁾, Uyu Wahyudin²⁾

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Indonesia

cephy.lucky81@gmail.com¹⁾

uwahyudin8181@gmail.com²⁾

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental. Penelitian ini menganalisis peran literasi digital sebagai pilar demokrasi digital dalam membangun kesadaran politik masyarakat di era disrupsi teknologi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2024 mencapai skor 43,34 yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih berada pada kategori menengah. Penelitian menggunakan metode literatur review dengan menganalisis berbagai sumber akademik terkait literasi digital, demokrasi digital, dan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi dan disinformasi yang mengancam integritas demokrasi. Data menunjukkan 42,3% responden masih percaya pada informasi salah terkait Pemilu 2024, sedangkan 13,82% dari konten politik di media sosial mengandung ujaran kebencian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi digital yang terstruktur dan komprehensif diperlukan untuk memperkuat demokrasi digital Indonesia melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Kata kunci: Literasi Digital, Demokrasi Digital, Kesadaran Politik, Misinformasi, Partisipasi Politik

Abstract

Digital technology development has fundamentally transformed Indonesia's political landscape. This research analyzes the role of digital literacy as a pillar of digital democracy in building public political awareness in the era of technological disruption. Indonesia's Digital Literacy Index in 2024 reached a score of 43.34, showing improvement from the previous year but still remaining in the moderate category. The research employs a literature review method by analyzing various academic sources related to digital literacy, digital democracy, and Indonesian public political participation. Findings reveal that low digital literacy contributes to the spread of misinformation and disinformation that threatens democratic integrity. Data shows that 42.3% of respondents still believe false information related to the 2024 Election, while 13.82% of political content on social media contains hate speech. This research concludes that structured and comprehensive digital literacy improvement is necessary to strengthen Indonesia's digital democracy through collaborative strategies among government, educational institutions, and civil society.

Keyword: Digital Literacy, Digital Democracy, Political Awareness, Misinformation, Political Participation

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah demokrasi, terutama di Indonesia, dengan meningkatnya penggunaan platform atau teknologi digital. Namun, kemampuan masyarakat untuk secara kritis mengolah informasi digital belum sejalan dengan peningkatan akses tersebut, yang menyebabkan masalah seperti hoaks, polarisasi, dan partisipasi politik yang tidak efektif. Teknologi digital mampu mengubah praktik demokrasi

adanya perubahan pola partisipasi politik masyarakat yang membuat kualitas demokrasi semakin meningkat (Gilardi, 2016).

Di Indonesia, awalnya media sosial digunakan untuk komunikasi pribadi dan hiburan (Gunawan & Ratmono, 2021). Namun, sekarang semakin banyak orang membahas politik dan isu publik, yang mendorong partisipasi masyarakat. Ini terlihat dari aktivitas di media sosial, seperti kampanye politik, kritik kebijakan, dan petisi digital. Media sosial kini penting untuk mencari dan bertukar informasi politik. Demokrasi digital di Indonesia muncul dari perkembangan teknologi informasi yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi publik dalam proses politik (Vandito, et.al. 2023).

Penggunaan internet dan media sosial telah mengubah cara orang terlibat dalam politik dan pemerintahan. Platform digital memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dan bertukar informasi, yang mengarah pada partisipasi publik yang lebih aktif dalam demokrasi (Nadliya, 2023; Al Fawaid, 2025). Namun, di Indonesia, media sosial, saluran utama untuk berbagi informasi, menghadapi tantangan karena misinformasi, terutama selama pemilihan umum (Tapsell, 2019). Mengenai hal ini, penulis menyoroti isu-isu atau permasalahan yang terkait dengan media sosial dan demokrasi digital.

Permasalahan mengenai media sosial, pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan ketakutan, depresi, dan isolasi sosial, terutama di kalangan kaum muda (Novitasari, 2022). Kedua, media sosial menjadi platform untuk distribusi gangguan online dan informasi palsu yang merusak reputasi individu dan memiliki dampak signifikan pada opini publik secara keseluruhan (Novitasari, 2022; Hafizh, 2023). Ketiga, media sosial sering menyebabkan konflik antara kelompok berdasarkan jenis, agama, atau etnis, dan memperburuk kohesi sosial (Leobisa, et al., 2023). Selain itu, meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik. Dan rendahnya literasi digital memudahkan masyarakat terpengaruh oleh berita palsu, yang bisa mengganggu demokrasi.

Masalah demokrasi digital di Indonesia mencakup peningkatan akses informasi yang tidak diiringi kemampuan masyarakat untuk memahaminya secara kritis. Pertama, penyebaran hoaks dan manipulasi data dapat merusak proses pemilu dan opini publik (Hafizh, 2023; Sudibyo, 2022). Kedua, pengumpulan data pribadi mengancam privasi tanpa regulasi yang tepat (Hafizh, 2023). Ketiga, polarisasi politik dapat memecah demokrasi, sedangkan perusahaan teknologi menggunakan demokrasi untuk kepentingan kapitalis (Sudibyo, 2022). Keempat, pemerintah dituduh menggunakan teknologi untuk mengekang kebebasan sipil, yang dapat mengancam demokrasi di Indonesia (Ufen, 2024). Oleh karena itu, demokrasi digital seharusnya meningkatkan transparansi, tetapi tanpa literasi yang baik, informasi bisa disalahgunakan. Selain itu, pemerintah masih kesulitan dalam membuat regulasi efektif untuk menangani dampak negatif media digital.

Transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi. Ini juga dapat memperkuat partisipasi publik (Vandito, et.al. 2023). Namun, untuk mencapai demokrasi digital yang efektif, diperlukan infrastruktur teknologi yang baik dan keterampilan digital yang tinggi. Tanpa keduanya, kesenjangan digital dapat tercipta. Media independen sangat penting untuk menyajikan informasi yang benar dan mencegah disinformasi (Zubair, et.al, 2024). Partisipasi masyarakat sipil juga berperan dalam pengawasan politik. Ada kebutuhan akan keseimbangan antara regulasi dan kebebasan digital untuk mendukung demokrasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan berkontribusi dalam lingkungan digital (Buckingham, 2015). Literasi menurut UNESCO yang dikutip oleh A'yuni dan Naufal mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menggunakan, dan berkomunikasi melalui bahan cetak dan tulisan, yang penting untuk pengembangan diri dan partisipasi dalam masyarakat (A'yuni, 2015; Naufal 2021). Menurut Martin, yang dikutip oleh Naufal, literasi digital merupakan kombinasi dari literasi informasi, komputer, visual, dan komunikasi (Martin, 2008; Naufal 2021). Menurut

Gilster, sebagaimana yang disampaikan oleh A'yuni, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai bentuk. (Gilster, 1997; A'yuni, 2015; Naufal, 2021). Maka, kemampuan literasi digital melibatkan keterampilan seperti evaluasi informasi yang kritis, pemahaman tentang privasi digital, partisipasi daring yang bertanggung jawab, dan pemanfaatan teknologi secara efektif dalam pemecahan masalah (Kirschner & De Bruyckere, 2017).

Oleh karena itu, literasi digital sangat penting, hal ini dapat melampaui sekadar kecakapan teknis. Literasi digital mencakup komitmen yang lebih luas untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang demokratis. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menemukan dan memanfaatkan informasi, tetapi juga pertimbangan etis seputar pembuatan dan penyebaran informasi. Tingginya literasi digital sangat penting dalam demokrasi digital agar masyarakat dapat menyaring informasi dengan baik dan tidak mudah termakan hoaks (Buckingham, 2015).

Tujuan penelitian mengetahui kesadaran politik masyarakat melalui literasi digital dalam memahami dan memilah informasi politik di media sosial; Dampak dari rendahnya literasi digital terhadap proses demokrasi digital di Indonesia; dan Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital guna memperkuat demokrasi digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review (kajian pustaka). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur secara sistematis. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif terhadap berbagai sumber literatur, meliputi artikel jurnal akademik, laporan resmi, dan buku terkait literasi digital, demokrasi digital, dan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan meliputi identifikasi literatur yang relevan, sintesis temuan, dan analisis mendalam mengenai peran literasi digital dalam membangun kesadaran politik. Analisis interpretatif dan sintesis temuan dipakai untuk memahami kesadaran politik masyarakat di era disrupsi teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Peluang Kondisi Literasi Digital Indonesia

Kondisi literasi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menjanjikan namun masih memerlukan perhatian serius. Sementara itu, Indeks Literasi Digital Indonesia (ILDI) tahun 2022 mencapai skor 3,54 dari skala 1-5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menunjukkan tren positif dengan skor 43,34 pada tahun 2024, meningkat dari 37,80 pada tahun 2022 (Hikmah et al., 2024).

Analisis per pilar menunjukkan variasi yang signifikan dalam kompetensi digital masyarakat Indonesia. Pilar Digital Culture mencatat skor tertinggi 3,84, diikuti Digital Ethics (3,68), Digital Skills (3,52), dan Digital Safety (3,12) (Komdigi, 2023). Dalam konteks IMDI 2024, pilar keterampilan digital memperoleh skor tertinggi 58,25, sedangkan pilar pemberdayaan mendapatkan skor terendah 25,66 (Budiarto, 2024). **Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses dan kemampuan dasar teknologi digital, pemanfaatan untuk produktivitas dan pemberdayaan ekonomi masih rendah. Lebih krusial lagi, rendahnya skor pada pilar Digital Safety (3,12) dan Pemberdayaan (25,66) menjadi titik kerentanan utama bagi integritas demokrasi digital. Skor Digital Safety yang rendah menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi diri dari ancaman digital, termasuk hoaks, penipuan, dan phishing. Kerentanan ini berkorelasi langsung dengan tingginya tingkat kepercayaan pada misinformasi politik, sebagaimana ditunjukkan oleh data 42,3% responden yang masih percaya informasi salah terkait Pemilu 2024. Kurangnya keterampilan Digital Safety dan Pemberdayaan menghambat masyarakat untuk secara kritis mengevaluasi informasi politik, sehingga melemahkan kesadaran politik yang berbasis fakta dan analisis mandiri.**

Disparitas regional juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan literasi digital

nasional. Padang menempati posisi teratas dengan skor IMDI yaitu 52,71, Jakarta Pusat (52,58), Kota Bandung 52,99, Kota Malang 52,64, Kota Denpasar 52,54, dan Kabupaten Buleleng 52,76. (BPSDM, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kewilayahan dalam program literasi digital untuk memastikan pemerataan akses dan kompetensi digital di seluruh Indonesia.

Media Sosial dan Transformasi Partisipasi Politik

Media sosial telah menjadi katalisator utama dalam transformasi partisipasi politik masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z yang mendominasi 60% pemilih Pemilu 2024 (Natalia et al., 2025). Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi politik, berinteraksi dengan kandidat, dan mengekspresikan preferensi politik mereka (Ahmad et al., 2024).

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik menunjukkan memiliki dampak positif dan negatif. Di sisi positif, media sosial meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi politik, memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif, dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemimpin dan konstituen (Wijaya & Sari, 2023). Generasi Z menunjukkan respons positif terhadap konten politik yang interaktif, visual, dan relevan dengan tren terkini (Natalia et al., 2025).

Namun, kemudahan akses informasi ini juga membawa risiko signifikan. Data menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran utama penyebaran disinformasi, dengan 1.923 hoaks di Indonesia seperti Facebook dan WhatsApp (Komdigi, 2024; Sarjito, 2024). Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi, di mana hanya 57,7% masyarakat yang melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima (Nurhasanah & Putri, 2023).

Ancaman Misinformasi dan Disinformasi dalam Demokrasi Digital

Misinformasi dan disinformasi telah menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi Indonesia. Survei CSIS dan SAIL mengungkapkan bahwa 42,3% responden masih percaya pada informasi salah terkait Pemilu 2024 (Fernandes, 2023). Fenomena ini menunjukkan rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi politik.

Pola penyebaran disinformasi menunjukkan karakteristik yang sistematis dan terstruktur. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 2.882 konten hoaks yang beredar di media sosial sepanjang awal 2024, dengan 203 di antaranya adalah hoaks tentang pemilu (Komdigi, 2024). Disinformasi politik sering memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, etnis, dan identitas untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi sosial. Ancaman ini diperburuk oleh fakta bahwa 13,82% dari konten politik yang beredar di media sosial mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) (Aliansi Jurnalis Independen, 2024). Tingginya persentase ujaran kebencian ini memiliki dampak merusak yang signifikan terhadap polarisasi dan integritas demokrasi digital.

Tingkat ujaran kebencian yang tinggi menciptakan lingkungan daring yang toksik, memecah belah masyarakat berdasarkan garis identitas, dan secara fundamental menghambat dialog publik yang konstruktif. Ujaran kebencian, sering kali disebarkan dalam konteks misinformasi, mendorong konflik antara kelompok dan memperburuk kohesi sosial, yang merupakan tantangan serius bagi demokrasi digital Indonesia. Fenomena ini mengancam integritas demokrasi karena merusak trust antarwarga dan terhadap institusi politik, sehingga mempersulit proses pengambilan keputusan kolektif yang rasional dan inklusif. Tingginya angka ini juga mencerminkan rendahnya Etika Digital dalam berinteraksi di ruang siber, yang menjadi salah satu pilar penting dalam literasi digital.

Dampak disinformasi terhadap demokrasi tidak hanya terbatas pada distorsi informasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa 87% warga percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi situasi politik di Indonesia

(Komdigi, 2024). Kondisi ini menciptakan krisis legitimasi informasi yang dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Gerakan Nasional Literasi Digital dan Efektivitasnya

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai respons terhadap tantangan literasi digital nasional. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat, dengan target melatih 50 juta warga Indonesia pada tahun 2024. Hingga 2024, GNLD telah meningkatkan literasi digital sebanyak 24.640.451 orang sejak 2017 (Hikmah et al., 2024).

Evaluasi efektivitas GNLD menunjukkan hasil yang beragam. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital, terutama di wilayah perkotaan. Namun, tantangan utama masih dihadapi dalam hal akses teknologi yang tidak merata, perbedaan budaya lokal, dan kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Hikmah et al., 2024).

Analisis implementasi GNLD mengidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yaitu: kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; pendekatan yang adaptif sesuai karakteristik lokal; dan integrasi program literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal (Sutrisno et al., 2024). Program pelatihan untuk pemilih pemula menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi hoaks (Pratama & Sari, 2024).

Strategi Pengembangan Literasi Digital untuk Demokrasi

Pengembangan literasi digital yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek teknologi, edukasi, dan regulasi. Analisis terhadap berbagai program literasi digital menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif melibatkan kombinasi pembelajaran formal dan informal, pemanfaatan teknologi interaktif, dan pendampingan berkelanjutan (Maharani & Pratama, 2024).

Strategi pengembangan literasi digital harus dimulai dari tingkat keluarga, di mana orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam penerapan literasi digital yang bertanggung jawab (Sari et al., 2024). Pada tingkat pendidikan, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum formal terbukti efektif dalam membangun fondasi keterampilan digital yang kuat (Wijaya et al., 2024).

Untuk masyarakat umum, program pelatihan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menunjukkan hasil yang positif. Program seperti yang dilaksanakan oleh MAFINDO dan berbagai lembaga anti-hoaks membuktikan efektivitas pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali dan melawan disinformasi (RRI, 2025).

Peran Teknologi dalam Memperkuat Demokrasi Digital

Teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Implementasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti sistem informasi terintegrasi dan platform digital untuk kampanye, telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses demokrasi (Waruwu, et al., 2024).

Namun, pemanfaatan teknologi untuk demokrasi juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan siber, privasi data, dan risiko manipulasi digital. Penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak demokratis (Santoso, 2024).

Platform digital juga berperan penting dalam memfasilitasi dialog publik dan deliberasi demokratis. Media sosial telah menjadi ruang baru untuk diskusi politik, meskipun perlu dikelola dengan bijak untuk mencegah polarisasi dan penyebaran disinformasi (Amelia et al., 2023).

Literasi Digital dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Analisis terhadap literasi digital menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti lansia, masyarakat pedesaan, dan pemilih pemula memerlukan perhatian khusus dalam program literasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penyebar hoaks berusia di atas 45 tahun, mengindikasikan rendahnya literasi digital pada kelompok ini (Nurjamal et al., 2024).

Program Akademi Digital Lansia menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kemampuan literasi digital kelompok rentan. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menciptakan pengalaman komunikasi positif yang meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital (Nurjamal et al., 2024).

Untuk pemilih pemula, program literasi digital terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan kritis dalam menyaring informasi politik. Pelatihan yang melibatkan simulasi penggunaan tools fact-checking seperti Hoax Buster Tools, Google Reverse Image, dan Chatbot Kalimasada menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mendeteksi hoaks (Pratama & Sari, 2024).

Implikasi Literasi Digital terhadap Ketahanan Nasional

Literasi digital memiliki implikasi strategis terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman disinformasi dan manipulasi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dapat dimanfaatkan oleh aktor malicious untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik (Rahman et al., 2024).

Analisis terhadap pola penyebaran disinformasi mengidentifikasi bahwa serangan informasi sering menargetkan isu-isu sensitif seperti SARA, politik identitas, dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan polarisasi masyarakat (Setiawan et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional di era digital.

Penguatan literasi digital juga berkontribusi terhadap resiliensi demokrasi dalam menghadapi tantangan global seperti propaganda asing, kampanye disinformasi transnasional, dan upaya destabilisasi politik melalui media digital (Ahmad & Putri, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literasi digital sebagai pilar demokrasi digital di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan penting, Pertama, kondisi literasi digital Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan Indeks Literasi Digital mencapai 3,54 dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 43,34 pada tahun 2024, namun masih berada pada kategori menengah dan memerlukan peningkatan signifikan untuk mencapai level optimal. Kedua, media sosial telah mentransformasi partisipasi politik masyarakat Indonesia, terutama generasi Z yang mendominasi 60% pemilih, namun rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi dengan 42,3% masyarakat masih percaya pada informasi salah terkait politik.

Ketiga, ancaman misinformasi dan disinformasi telah menjadi risiko serius bagi integritas demokrasi, dengan 13,82% konten politik di media sosial mengandung ujaran kebencian dan 70% hoaks disebarluaskan melalui platform digital.

Keempat, Gerakan Nasional Literasi Digital menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran digital masyarakat, namun menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses, kesenjangan infrastruktur, dan adaptasi terhadap keragaman budaya lokal. Kelima, strategi pengembangan literasi digital yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal, pemanfaatan teknologi interaktif, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan yaitu, untuk memperkuat literasi digital sebagai pilar demokrasi, ada lima area utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus fokus pada penguatan regulasi dan infrastruktur serta mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan perlu melatih guru dan



membangun pusat literasi untuk meningkatkan kompetensi digital. Masyarakat sipil dapat berperan dengan memperkuat jaringan pemeriksa fakta dan mengembangkan program literasi berbasis komunitas. Platform digital bertanggung jawab untuk memperkuat sistem deteksi disinformasi dan meningkatkan transparansi algoritma. Terakhir, penelitian lanjutan sangat penting untuk mengembangkan indikator literasi digital yang sesuai dengan konteks lokal dan menganalisis dampak jangka panjang dari inisiatif yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Q. Q. (2015). Literasi Digital Remaja Di Kota Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Tingkat Kompetensi Literasi Digital Pada Remaja SMP, SMA dan Mahasiswa Di Kota Surabaya). *Libri-Net*, 4(2), 1–15. [https://journal.unair.ac.id/LN@literasi-digital-remaja-di-kota-surabaya-\(studi-deskriptif-tentang-tingkat-kompetensi-literasi-digital-pada-remaja-smp,-sma-dan-mahasiswa-article-9195-media-136-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/LN@literasi-digital-remaja-di-kota-surabaya-(studi-deskriptif-tentang-tingkat-kompetensi-literasi-digital-pada-remaja-smp,-sma-dan-mahasiswa-article-9195-media-136-category-8.html)
- Aliansi Jurnalis Independen. (2024). Laporan pemantauan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan pada Pemilu 2024 (I. Idris, D. Wijaya, M. I. Wijanarko, & Tim AJI Indonesia, Penulis). Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. Diakses dari <https://aji.or.id/system/files/2024-08/laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-rentan-pada-pemilu-2024bahasa-indonesia.pdf>
- BPSDM. (2024). Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024: "Membangun Masyarakat Digital Berbasis Kewilayahan". <https://bpsdm.komdigi.go.id/satker/pusbangesdmk/berita-peluncuran-hasil-pengukuran-indeks-masyarakat-digital-indonesia-imdi-2024-m-5-76>.
- Buckingham, D. (2015). Defining digital literacy: What do young people need to know about digital media? *Nordic Journal of Digital Literacy*, 1(4), 21–34. <https://doi.org/10.18261/issn1891-943x-2015-jubileumsnummer-03>
- Budiarto, H., Pahlevi, S. M., Susenna, A., Kusumasari, D., Agustina, L., A. S., Y. A., Hernikawati, D., & Rahmi, A. A. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo).
- CSIS. (2023). Survei opini publik: Proyeksi dan mitigasi gangguan informasi Pemilu 2024. Centre for Strategic and International Studies. <https://www.csis.or.id/event/rilis-survei-opini-publik-proyeksi-dan-mitigasi-gangguan-informasi-pemilu/>
- Gilardi, F. (2016). Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. *State Politics and Policy Quarterly*, 16(1), 8–21. <https://www.jstor.org/stable/44014884>
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. New York: Wiley Computer Pub.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Medsos Di Antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Jakarta : Rayyana Komunikasindo.
- Hafizh, I. (Desember, 2023). Tantangan Implementasi Demokrasi di Era Digital: Memelihara Prinsip-Prinsip Demokrasi di Era Digital. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/ilhamhfzh/657223b112d50f1e1e72a864/tantanganimplementasi-demokrasi-di-era-digital-memelihara-prinsip-prinsip-demokrasi-di-eradigital>
- Hikmah, B., Muaz, R. A., & Rachman, I. F. (2024). Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD): Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. *Jurnal Nakula*, 2(3), 253-265. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i3.825>
- Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017). The myths of the digital native and the multitasker. *Teaching and Teacher Education*, 67, 135-142. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001>
- Komdigi. (2023). Hasil survei Indeks Literasi Digital Indonesia 2022. Dirjen Aplikasi Informatika. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/berita-foto-kominfo-rilis-status-literasi-digital-indonesia-tahun-2022>
- Komdigi. (2024). Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan



- Informatika. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-03-hm-kominfo-01-2024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024>
- Leobisa, J., Soleman B., Yorhans S. L., & Yakobus A. S. (2023). Tantangan Penggunaan Media Sosial di Era Disrupsi dan Peran Pendidikan Etika Kristen. *ALETHEIA*, 4(1), 38-48. <https://doi.org/10.9744/aletheia.4.1.38-48>.
- Maharani, S., & Pratama, D. (2024). Strategi peningkatan kualitas literasi digital pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, 8(4), 234-251. <https://doi.org/10.61132/bima.v2i2.846>.
- Martin, A. (2008). Digital Literacy and the "Digital Society". In C. Lankshear, & M. Knobel (Eds.), *Digital Literacies: Concepts, Policies, and Practices* (pp. 151-176). New York: Peter Lang.
- Nadliya, L. (2023). Demokrasi Digital Pengaruhnya Terhadap Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/lailanadliya0744/655f067aee794a55172baae2/demokrasi-digital-pengaruhnya-terhadap-politik-dan-pemerintahan-diindonesia>.
- Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M. R. S. (2025). Partisipasi Politik Generasi Z: Peran Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15772–15778. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28067>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Jurnal PERSPEKTIF*, 1(1). <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Novitasari, A. S. (2022). Dampak Media Sosial Terhadap Kehidupan di Era Digital. *Binus University*. <https://binus.ac.id/malang/communication/2022/11/15/dampak-media-sosial-terhadap-kehidupan-di-era-digital/>
- Komdigi. (2024). Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- RRI. (2024). Peran Mafindo dalam Menangkal Hoax Jelang Pilkada 2024. <https://rri.co.id/pemilu/824888/peran-mafindo-dalam-menangkal-hoax-jelang-pilkada-2024>.
- Santoso, I. A. P. (2024). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 15(3), 112-128. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/download/1547/871>.
- Sudibyo, A. (2022). Balkanisasi Demokrasi Digital. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/13/balkanisasi-demokrasi-digital>.
- Tapsell, R. (2019). Kuasai Media Di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Ufen, A. (2024). The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo. (GIGA Focus Asien, 1). German Institute for Global and Area Studies (GIGA) - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Institut für Asien-Studien. <https://doi.org/10.57671/gfas-24012>.
- Vandito, R. L., Paramesti, A., Vardan Aminudin, M. A., & Wulandari, L. (2023). Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform "Jakarta Kini (JAKI)" Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat. *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1-16. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/1108>.
- Waruwu, D., Hombing, H. D. S. S., Situmorang, S. E., & Elsi, S. (2024). Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4, 776-784.
- Zubair, A. C., Tim Satu Pena, Sudibyo, A., Widjojo, A., Herfanda, A. Y., Suleiman, A., Nasery, A., Minderop, A., Nurish, A., Makka, A. M., & Purwasito, A. (2021). *Demokrasi di Era Digital*. Pustaka Obor Indonesia.